

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya sebuah kebudayaan memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan manifestasi, dan legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik. Lingkup kebudayaan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat seperti keyakinan, hukum, adat istiadat, kebiasaan, nilai, norma, dan juga moral.

Lunturnya kebudayaan pada suatu kelompok masyarakat dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius. Terlebih pada era sekarang, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat sebagai bagian dari proses globalisasi, membuat masyarakat terhubung satu sama lainnya sehingga pengaruh kebudayaan antarwilayah di dunia semakin kuat. Oleh karenanya, diperlukan pelestarian kebudayaan pada setiap daerah agar masyarakat tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Hal yang perlu dipahami dalam memaknai konsep budaya adalah bahwa kebudayaan tidak hanya berbentuk fisik atau benda saja seperti tari dan artefak, namun kebudayaan dapat berupa cara hidup (*ways of life*) dan pengetahuan lokal yang terdapat dalam masyarakat. Kebudayaan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan seperti yang sudah diterapkan oleh negara-negara lain di dunia seperti Korea Selatan dan Jepang yang menjadikan kebudayaan sebagai pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Belum maksimalnya pengembangan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional memerlukan suatu upaya pemajuan kebudayaan.

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 18 Urusan salah satunya adalah urusan kebudayaan. Maka dapat dikemukakan bahwa urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan sesuai dengan amanat UU Undang-Undang Dasar Negara RI Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Oleh karena itu bagian dari Negara atau pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memajukan kebudayaan melalui

penyelenggaraan kebudayaan yang di kelola oleh sebuah organisasi perangkat daerah dalam bentuk Dinas Kebudayaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak semua komponen bangsa secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dimulai dari instrumen legislasi dan regulasi tingkat pusat sampai ke daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 menegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Pemajuan kebudayaan memiliki 10 (sepuluh) objek kebudayaan yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan Kebudayaan.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama

2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- 6.

Dalam menyelenggarakan sejumlah fungsi ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat dalam RPJMN 2020-2024. Amanat tersebut dijabarkan dalam :

Perioritas Nasional: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; **Perioritas Pembangunan meliputi:** Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; Memperkuat Moderasi Beragama; Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas; untuk **Kebijakan Pembangunan meliputi:** Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan local; Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya; Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya; Pengembangan diplomasi budaya; Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 7 Isu Pokok Pemajuan Kebudayaan: Pengerasan identitas primordial dan sentimen sectarian; Modernitas dan tradisi; Disrupsi teknologi informatika; Ketimpangan relasi budaya dalam globalisasi; Pembangunan yang mengorbankan ekosistem alam dan budaya; Tata kelembagaan budaya belum optimal; Desain kebijakan belum memudahkan masyarakat memajukan budaya. Program prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Ristek RI meliputi; Jalur Rempah, Desa Pemajuan kebudayaan, Repatriasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda, Media Kebudayaan dan Kanal Budaya, Advokasi Masyarakat Adat, Pekan Kebudayaan Nasional.

Begitupula Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Pasal 12 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 3 digunakan sebagai rujukan dalam

rencana kerja pemerintah Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD), Pasal 13 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 3 menjadi bahan dasar Menteri dalam Menyusun Strategi Kebudayaan.

Dalam dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 hal IV 132 point o salah satu isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kebudayaan. Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sulteng merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Dalam konteks ini, di Tahun 2021, telah disahkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng berusaha menyusun strategi bertumpu pada beberapa permasalahan (i) Belum tersedianya secara komprehensif, *by name by address dan by cases* data dan informasi lengkap, mutakhir tentang potensi dan khazanah kebudayaan daerah yang ada yang berorientasi pada *cultural evidence based policy*; (ii) Sumberdaya Manusia yang bekerja di sektor Kebudayaan baik dari kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat relative tingkat penghidupannya kurang memadai; (iii) Belum adanya titik temu pemahaman antara hubungan agama dan kegiatan budaya; (iv) Kegiatan dan Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah belum menjadi isu utama, baik dalam suksesi politik maupun dalam isu perencanaan pembangunan, kebijakan pembangunan dan politik anggaran; (v) Peran Negara/pemerintah dalam penangan budaya masih bersifat intervesionist. pemerintah dalam upaya pemajuan kebudayaan sepatutnya berperan dalam posisi fasilitatif dan *enabling setting* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Pemajuan Kebudayaan; (vi) Masalah desentralisasi dan jarak pengambilan keputusan tentang pemajuan kebudayaan cenderung terjadi *re-sentralisasi*, lemahnya upaya pemajuan cagar budaya di Sulawesi Tengah; (vii) Upaya Pelembagaan Nilai-nilai dan Pemajuan budaya daerah melalui lembaga pendidikan belum optimal, sehingga pemuatan nilai dan pemajuan kebudayaan daerah melalui lembaga pendidikan masih bersifat opsional dan sekunder baik secara kurikuler maupun kelembagaan pendidikan; (viii) Banyak produk budaya lokal, terutama produk hasil teknologi/pengetahuan lokal belum terlindungi oleh hukum secara memadai.

Dalam konteks ini, kinerja Pemerintah Provinsi Sulteng Periode 2021-2024 terletak pada tercapainya pelembagaan kebudayaan di Sulawesi Tengah yang tercermin dari berdiri sendirinya Perangkat Daerah Kebudayaan sehingga secara kelembagaan pemajuan kebudayaan terintegrasi dan terwadahi dalam Lembaga

Pemerintah yang saling sinergi dalam semangat Pentahelix Pemajuan Kebudayaan Sulteng. Esensi kebudayaan yang sarat makna perlu digali, ditampilkan dan diintroduksi kembali sebagai identitas beragam suku di Sulawesi Tengah. Keragaman suku dengan berbagai unsur budaya di Sulawesi Tengah, pada dasarnya dapat menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan Kebudayaan.

Sehingga Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan capaian Urusan Kebudayaan pembangunan, dimana hingga saat ini, juga melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) urusan Kebudayaan di Kabupaten/Kota, dalam hal ini dengan mempertimbangkan masukan dan potensi-potensi kekuatan disetiap Renstra SKPD Dinas Kabupaten masing-masing Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dan partisipasi seluruh pejabat Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan, serta acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra-SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah 2021- 2026 disusun berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Pancasila sebagai landasan ideal dan landasan operasional berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
8. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah Periode 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud yang ingin dicapai dari rumusan renstra ini sebagai berikut :

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang taktis strategis dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kebudayaan.
- b. Tersusunnya rencana kegiatan Pemanfaatan, Pengembangan, Perlindungan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- c. Tersusunnya rencana kegiatan peningkatan pembinaan mental spiritual (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara mandiri dan melembaga.
- d. Tersusunnya rencana dan kegiatan kebudayaan .
- e. Tersediannya dokumen tentang informasi nilai-nilai sejarah, kesenian dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta potensi budaya di provinsi sulawesi Tengah

1.3.2. Tujuan yang ingin dicapai dari rumusan renstra ini sebagai berikut :

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- Untuk menjabarkan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam TUSI SKPD Dinas Kebudayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- Sebagai acuan utama bagi jajaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun dan merumuskan program dan kegiatan Tahunan atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
- Sebagai acuan dalam penetapan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah dalam perencanaan Kebudayaan.
- Sebagai dasar pijakan bagi Dinas Kebudayaan untuk mengukur dan evaluasi pencapaian kinerja satuan kerja.

1.4.Sistematika Penulisan.

Renja OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tahapan diatas, Renstra-SKPD sebagai sebuah dokumen tepat, melalui urutan pilihan, dengan menghitung sumber daya tersedia. Pelaksanaan Renstra Perubahan SKPD akan mengacu pada pencapaian tujuan Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan komponen utama dari pencapaian Visi, Misi Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga sistematika penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2021-2026, dapat dikemukakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra OPD**
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi OPD**
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5 Penelaahan Usulan Program**

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**
- 3.3 Program dan Kegiatan**

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

○ 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan

Rencana Kinerja 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) 2023-2026. Sesuai dengan Rencana Kinerja 2023, maka dalam periode ini Dinas Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menetapkan **2 tujuan** yang dibagi menjadi **5 sasaran strategik** Selanjutnya sasaran strategik tersebut diwujudkan dalam **5 Program** dan **kegiatan** dengan anggaran biaya sebesar : **Rp.,-** yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung masih melekat pada Dinas Pendidikan** sebesar **Rp. 550.000.430.751,63,-** dan **Belanja Langsung** sebesar **Rp.,-**

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil memenuhi 5 **sasaran strategik** yang ditargetkan yang mencakup :

Capaian untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

2. Dipertahankan opini Laporan Keungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3. Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebinekaan) untuk mendukung

- **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah**

Kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan budayanya dari arus perubahan global di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kompetensi masyarakatnya untuk menjaga budayanya agar bisa berkontribusi secara nasional dan global. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.

Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antar budaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan.

Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Dinas Kebudayaan mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan pemajuan kebudayaan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam Dalam periode yang lalu (2021-2026), Dinas Kebudayaan telah mengimplementasikan Nawacita serta Kebijakan RPJMD dalam berbagai program kerja prioritas, seperti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dinas Kebudayaan juga mengelola sektor Kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pembangunan kebudayaan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan akan memperhitungkan trend global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perkembangan peradaban Dunia.

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan

munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone. Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar. Pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender..

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, serta kebijakan Kemendikbud, Ristek RI, maka Dinas Kebudayaan berupaya merangkul semua pemangku kepentingan kebudayaan antara lain keluarga, pelaku Seni Budaya, Pemerhati Budaya, dan Penggiat Budaya, industri seni, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan kebudayaan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri Bangsa. Selain berbagai potensi yang dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan pembangunan Kebudayaan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut harus diatasi dalam kurun waktu 2021-2026.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	PEMAJUAN KEBUDAYAAN	1. MASIH BANYAK CAGAR BUDAYA YANG BELUM DITETAPKAN PERINGKATNYA BAIK TKT. KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL	TIDAK TERSEDIA TIM AHLI CAGAR BUDAYA KAB/KOTA UNTUK MENETAPKAN CAGAR BUDAYA KAB/KOTA SEHINGGA PROVINSI BELUM MENETAPKAN
		2. KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SENIBUDAYA	TIDAK TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN
		3. KURANGNYA PEMBINAAN PELAKU SENIBUDAYA DIMASYARAKAT	DUKUNGAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PELAKU SENI BUDAYA BELUM TERSEDIA
2.	REFORMASI BIROKRASI	1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BELUM MENYESUAIKAN DENGAN STRUKTUR KEMENTERIAN TEKNIS	
		2. BELUM TERAKOMODIRNYA BIDANG KEBUDAYAAN PADA BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH.	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BELUM BERPIHAK PADA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
		3. KURANGNYA PEMBINAAN SDM APARATUR	

- **2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.

Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan.

Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah

dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2016-2020), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Nawacita serta Kebijakan RPJMD dalam berbagai program kerja prioritas, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Memasuki periode selanjutnya (2021-2026), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kembali mengelola sektor pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena

harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya.

Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, sesuai arahan Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, serta kebijakan Kemendikbud, tentang Merdeka Belajar, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Selain berbagai potensi yang dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut harus diatasi dalam kurun waktu 2021-2026.

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan (APM), khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar. Namun, jika dilihat dari pemerataan akses masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya APK atau APM yang cukup lebar pada semua jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap siswa juga menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota.

Salah satu permasalahan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan erat dengan akses adalah banyaknya anak putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Salah satu penyebab terjadinya anak putus sekolah adalah kemiskinan. Kebijakan terobosan seperti penyediaan dana BOS dan beasiswa miskin secara massal telah terbukti dapat menurunkan angka putus sekolah tersebut.

Disparitas juga terjadi pada indikator pendidikan lainnya, seperti persentase guru SD berkualifikasi S-1/D-4. Disparitas berbagai indikator kinerja pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Sebab itu, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu dilaksanakan secara konsekuen

Disparitas tersebut mungkin selama ini tidak disadari oleh pemerintah daerah karena dalam

setiap dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya tidak pernah dicantumkan kewajiban pemerintah daerah dalam pencapaian target atau sasaran kinerja pembangunan pendidikan. Masih dalam aspek akses pendidikan, kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Hal ini berarti bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk kelompok termiskin masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk kelompok terkaya. Kebijakan pendanaan massal seperti BOS, beasiswa miskin, BKM, BOM telah terbukti dapat mengurangi disparitas partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya tersebut. Karena itu, kebijakan pendanaan massal perlu dilanjutkan di masa datang dengan mekanisme dan metode penyaluran yang lebih baik.

Disparitas dalam kesempatan memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan penduduk yang tinggal di perkotaan. Sebab itu, kebijakan terobosan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun terakhir perlu dilanjutkan dengan menitikberatkan pembangunan pada kabupaten dengan angka partisipasi pendidikan yang relatif masih rendah, dan dengan memperhatikan disparitas akses pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan hingga ke daerah terpencil.

Meski belum memiliki data akurat, diprediksi bahwa rasio Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada setiap jenjang pendidikan masih terdapat kesenjangan. Jadi, pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga perlu memperhatikan upaya pengurangan disparitas antargender.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya mutu pendidikan. Meski dalam berbagai olimpiade nasional beberapa peserta dari Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mengukir prestasi dengan meraih medali emas, perak, dan perunggu sebagai salah satu indikator mutu yang tinggi, tetapi secara global, mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih termasuk rendah. Pada level nasional, kualitas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi lain terutama provinsi yang ada di wilayah pulau Jawa.

Permasalahan pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian adalah mutu tenaga pendidik. Lemahnya sistem remunerasi bagi pendidik ditengarai berakibat terhadap mutu pendidikan karena mutu pendidikan sangat bergantung pada mutu pendidik. Selain itu banyak ditemukan kasus guru yang mengajar di luar bidang keahliannya (*mismatch*) karena keterbatasan jumlah guru khususnya di daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal. Karena itu, Pemerintah, sesuai dengan amanat **Undang-Undang No. 14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen, mengembangkan program sertifikasi guru. Program tersebut sekaligus menjawab tuntutan perbaikan remunerasi. Namun, dalam program sertifikasi tersebut belum ada kajian tentang korelasi peningkatan profesi guru dengan peningkatan mutu pendidikan yang dicirikan dari nilai UN. Permasalahan lain dalam hal guru adalah disparitas distribusinya. Jika ditinjau secara keseluruhan rasio siswa/guru sudah sangat baik, tetapi disparitas antar kabupaten/kota masih cukup lebar, bahkan di daerah terpencil masih banyak satuan pendidikan khususnya SD yang hanya memiliki

satu atau dua orang guru. Karena itu, penerapan **Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007** yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu lebih dipertegas dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang mendapat porsi anggaran terbesar dalam APBN dan APBD sesuai dengan tuntutan konstitusi. Dari tahun ke tahun, anggaran fungsi pendidikan dalam APBN meningkat secara nyata. Namun dengan dimasukkannya komponen gaji dalam ketentuan 20% tersebut berakibat pada menurunnya persentase anggaran pendidikan di banyak kabupaten/kota. Di beberapa daerah bahkan persentase gaji guru dan tunjangan lainnya saja sudah hampir mencapai 20% sehingga anggaran yang tersisa untuk kegiatan lain tidak tersedia.

Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan perkembangan kurikulum tersebut, antara lain dikenal **Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2006, dan terakhir Kurikulum 2013**. Pada masa lalu, kurikulum pendidikan syarat dengan materi tambahan yang tidak ada atau sangat sedikit kaitannya dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak. Meski kehadiran kurikulum 2013 telah meng-akomodir hampir seluruh kekurangan dan kelemahan kurikulum sebelumnya, tetapi penerapannya di sekolah masih menuai banyak hambatan, terutama ditinjau dari aspek kompetensi guru untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dalam penciptaan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien belum optimal. Selain itu, belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen tinggi untuk menyediakan anggaran pendidikan yang memadai. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan serta belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian

Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang merupakan representasi masyarakat perlu ditingkatkan. Diharapkan, dengan berlakunya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat memperjelas tugas, peran dan tanggung jawab setiap jenjang pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.

Salah satu permasalahan yang cukup kronis adalah ketersediaan data pada saat yang tepat. Tersedianya data yang akurat pada saat yang tepat merupakan syarat utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan. Namun, persoalan pendataan tersebut masih merupakan titik lemah dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian di masa datang. Keberadaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berperan cukup besar dalam membantu mengatasi permasalahan ini bagi kepentingan pembangunan pendidikan di daerah.

Implementasi sebuah kebijakan dengan tujuan yang sangat baik dapat berakibat kontra produktif bila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang tepat. Kebijakan tentang program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru menjadi salah satu contoh nyata yang terjadi saat ini. Dengan harapan memperoleh kualifikasi akademik S1/D4 dan atau lolos sertifikasi untuk meningkatkan status sosial dan kesejahteraan, tidak sedikit guru yang lebih fokus pada aktivitas tersebut dengan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di sekolah. Permasalahan lain menyangkut kinerja guru adalah rendahnya komitmen guru dalam melaksanakan tugas profesi. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan upaya peningkatan mutu guru melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru tidak akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan pendidikan di daerah terpencil akan menjadi lebih sulit dengan tiadanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana prasarana pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan sarana transportasi dan telekomunikasi, di samping sarana pendukung lainnya. Demikian pula ketidakselarasan berbagai pembangunan bidang lain dengan pembangunan bidang pendidikan merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan pendidikan yang berkeadilan. Rendahnya daya saing pendidikan antar wilayah kabupaten/kota juga perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan pendidikan ke depan. Keberadaan sekolah unggulan masih

didominasi oleh daerah perkotaan, atau belum menyebar di beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka kecenderungan penumpukan siswa di daerah perkotaan akan semakin tinggi, yang akan berdampak pada semakin tingginya disparitas APK antar wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal tata kelola pendidikan, masih ada peluang bagi sebagian anggaran yang belum sepenuhnya dibelanjakan secara efektif dan efisien. Hal ini, antara lain karena masih adanya orientasi proyek pada sebagian pengelola pembangunan pendidikan. Anggapan bahwa penyerapan anggaran merupakan prestasi kerja masih melekat pada sebagian pengelola anggaran pembangunan pendidikan. Sementara itu, capaian indikator kinerja sebagai bukti keberhasilan pembangunan pendidikan belum menjadi tujuan utama. Karena itu, kualitas pemantauan dan evaluasi program dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga perlu ditingkatkan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan

Sesuai dengan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang berlandaskan pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2021-2026 yakni :

“GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”.

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah **Gerak Cepat, Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**. Pokok-pokok visi akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut :

Gerak Cepat : Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.

Lebih Sejahtera : Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.

Lebih Maju : Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang Lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Visi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam **RPJMD Periode 2021-2026** harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam **RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025**, yaitu

**“SULAWESI TENGAH YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AMAN DAN
BERKEADILAN“**

Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan yang berorientasi ke masa depan;
2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara swadaya;
4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara bersama;
5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;

Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum dan HAM,serta saling menghormati keberagaman dalam berbangsa dan bernegara.

Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Prov. Sulteng yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 disajikan dalam Tabel berikut ini:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomas Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	1	% CB yang telah ditetapkan	25	30	35	40	45	50
2			% WB yang telah ditetapkan	25	30	35	40	45	50	
3			% penduduk (10 th) keatas yg menggunakan Bahasa daerah	25	30	35	40	45	50	
4			% penduduk > 10 th Menonton pertunjukkan seni	25	30	35	40	45	50	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			5	% penduduk > 10 th Mengunjungi peninggalan sejarah	25	30	35	40	45	50
			6	% RT menggunakan produk tradisional	25	30	35	40	45	50
			7	Peningkatan dan Pengelolaan Museum	8.500 koleksi BCB					
		Terwujudnya Pengembangan Kesenian Daerah	1	Pembinaan dan Pengelolaan Seni Budaya, dan Perfilman	65	70	75	80	85	90
			2	% penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni sebagai sumber Penghasilan	65	70	75	80	85	90
			3	% penduduk > 10 th yg terlibat pelaku pertunjukkan seni	65	70	75	80	85	90
		Meningkatny apelestarian nilai-nilai BudayaL Okal	1	% RT menyelenggarakan upacara adat	65	70	75	80	85	90
			2	% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat	65	70	75	80	85	90
				% penduduk berumur						

			3	10 th koatas yang mengikuti gotong Royong	65	70	75	80	85	90
			4	% penduduk>10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan Daerah	65	70	75	80	85	90
			5	% CB yang telah ditetapkan	65	70	75	80	85	90
			6	% penduduk>10 th Menonton pertunjukkan seni	65	70	75	80	85	90

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Peningkatan Jati Diri Pengantar Pendidikan		1	% penduduk>10 th mengunjungi peninggalan sejarah	25	30	35	40	45	50
			2	Peningkatan dan Pengelolaan Museum	8.500 koleksi BCB					
			3	% penduduk>10 th yg mengunjungi perpustakaan/TBM	65	70	75	80	85	90
			4	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	0.88	0.9	1	1.5	2	2.5

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan RKPD Dinas Kebudayaan prov. Sulteng Tahun 2023 Telah Tersusun 5 (Lima) Program yang terjabarkan dalam 7 (Tujuh) Kegiatan dan 11 (Sebelas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Daerah Provinsi	1	Pelindungan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
				2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
3	Program Pembinaan Sejarah	1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	1	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan	1	Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Provinsi	1	Pelindungan Cagar Budaya
				2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

	Cagar Budaya	2	Penetapan Cagar Budaya Tingkat Provinsi	1	Pendaftara Objek Diduga Cagar Budaya
5	Program Pengelolaan Permuseuman	1	Pengelolaan Museum Provinsi	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
				2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
				3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

TABEL

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1	
DINAS						
UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM						
TOTAL						

a. Rekap 2 (Per Urusan Bidang)

TABEL

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
DINAS						
UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM						
X						
X.XX						
DINAS						
UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	5,180,000,000	6,216,000,000	7,459,200,000	8,951,040,000	10,741,248,000	12,889,497,600
TOTAL						

b. Rekap 3 (Per Program)

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			3,500,000,000	4,200,000,000	5,040,000,000	6,048,000,000	7,257,600,000	8,709,120,000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8,450,000,000	10,140,000,000	12,168,000,000	14,601,600,000	17,521,920,000	21,026,304,000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8,450,000,000	10,140,000,000	12,168,000,000	14,601,600,000	17,521,920,000	21,026,304,000
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2,400,000,000	2,880,000,000	3,456,000,000	4,147,200,000	4,976,640,000	5,971,968,000
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			1,350,000,000	1,620,000,000	1,944,000,000	2,332,800,000	2,799,360,000	3,359,232,000
DINAS			750,000,000	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	1,555,200,000	1,866,240,000
UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM			600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000	1,492,992,000
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			1,000,000,000	1,200,000,000	1,440,000,000	1,728,000,000	2,073,600,000	2,488,320,000
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			2,000,000,000	2,400,000,000	2,880,000,000	3,456,000,000	4,147,200,000	4,976,640,000
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			1,700,000,000	2,040,000,000	2,448,000,000	2,937,600,000	3,525,120,000	4,230,144,000
X			665,363,752,077	798,436,502,492	958,123,802,991	1,149,748,563,589	1,379,698,276,307	1,655,637,931,568

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
X.XX			665,363,752,077	798,436,502,492	958,123,802,991	1,149,748,563,589	1,379,698,276,307	1,655,637,931,568
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		665,363,752,077	798,436,502,492	958,123,802,991	1,149,748,563,589	1,379,698,276,307	1,655,637,931,568
		DINAS	629,103,752,077	754,924,502,492	905,909,402,991	1,087,091,283,589	1,304,509,540,307	1,565,411,448,368
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	5,180,000,000	6,216,000,000	7,459,200,000	8,951,040,000	10,741,248,000	12,889,497,600
TOTAL			1,140,278,442,077	1,368,334,130,492	1,642,000,956,591	1,970,401,147,909	2,364,481,377,491	2,837,377,652,989

c. Rekap 3 (Per Kegiatan)

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1		2	3	4	5	6	7
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		3,500,000,000	4,200,000,000	5,040,000,000	6,048,000,000	7,257,600,000	8,709,120,000
	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3,500,000,000	4,200,000,000	5,040,000,000	6,048,000,000	7,257,600,000	8,709,120,000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		8,450,000,000	10,140,000,000	12,168,000,000	14,601,600,000	17,521,920,000	21,026,304,000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		8,450,000,000	10,140,000,000	12,168,000,000	14,601,600,000	17,521,920,000	21,026,304,000
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2,400,000,000	2,880,000,000	3,456,000,000	4,147,200,000	4,976,640,000	5,971,968,000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
		2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	1,555,200,000	1,866,240,000	2,239,488,000
		2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	750,000,000	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	1,555,200,000	1,866,240,000
		2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750,000,000	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	1,555,200,000	1,866,240,000
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		1,350,000,000	1,620,000,000	1,944,000,000	2,332,800,000	2,799,360,000	3,359,232,000
		2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,350,000,000	1,620,000,000	1,944,000,000	2,332,800,000	2,799,360,000	3,359,232,000
		DINAS	750,000,000	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	1,555,200,000	1,866,240,000
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000	1,492,992,000
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		1,000,000,000	1,200,000,000	1,440,000,000	1,728,000,000	2,073,600,000	2,488,320,000
		2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	1,000,000,000	1,200,000,000	1,440,000,000	1,728,000,000	2,073,600,000	2,488,320,000
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		2,000,000,000	2,400,000,000	2,880,000,000	3,456,000,000	4,147,200,000	4,976,640,000
		2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1,000,000,000	1,200,000,000	1,440,000,000	1,728,000,000	2,073,600,000	2,488,320,000
		2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		1,700,000,000	2,040,000,000	2,448,000,000	2,937,600,000	3,525,120,000	4,230,144,000
		2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	1,700,000,000	2,040,000,000	2,448,000,000	2,937,600,000	3,525,120,000	4,230,144,000
X			665,363,752,077	798,436,502,492	958,123,802,991	1,149,748,563,589	1,379,698,276,307	1,655,637,931,568
X.XX			665,363,752,077	798,436,502,492	958,123,802,991	1,149,748,563,589	1,379,698,276,307	1,655,637,931,568
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		665,363,752,077	798,436,502,492	958,123,802,991	1,149,748,563,589	1,379,698,276,307	1,655,637,931,568
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,967,500,000	16,761,000,000	20,113,200,000	24,135,840,000	28,963,008,000	34,755,609,600

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
		DINAS	10,397,500,000	12,477,000,000	14,972,400,000	17,966,880,000	21,560,256,000	25,872,307,200
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	510,000,000	612,000,000	734,400,000	881,280,000	1,057,536,000	1,269,043,200
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	602,206,252,077	722,647,502,492	867,177,002,991	1,040,612,403,589	1,248,734,884,307	1,498,481,861,168
		DINAS	599,231,252,077	719,077,502,492	862,893,002,991	1,035,471,603,589	1,242,565,924,307	1,491,079,109,168
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	425,000,000	510,000,000	612,000,000	734,400,000	881,280,000	1,057,536,000
		X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,400,000,000	1,680,000,000	2,016,000,000	2,419,200,000	2,903,040,000	3,483,648,000
		X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	700,000,000	840,000,000	1,008,000,000	1,209,600,000	1,451,520,000	1,741,824,000
		X.XX.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		X.XX.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		X.XX.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		X.XX.01.1.04.04 Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		X.XX.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		X.XX.01.1.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		X.XX.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,945,000,000	10,734,000,000	12,880,800,000	15,456,960,000	18,548,352,000	22,258,022,400
		DINAS	2,400,000,000	2,880,000,000	3,456,000,000	4,147,200,000	4,976,640,000	5,971,968,000
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	935,000,000	1,122,000,000	1,346,400,000	1,615,680,000	1,938,816,000	2,326,579,200
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,195,000,000	11,034,000,000	13,240,800,000	15,888,960,000	19,066,752,000	22,880,102,400
		DINAS	2,650,000,000	3,180,000,000	3,816,000,000	4,579,200,000	5,495,040,000	6,594,048,000
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	935,000,000	1,122,000,000	1,346,400,000	1,615,680,000	1,938,816,000	2,326,579,200
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,000,000,000	15,600,000,000	18,720,000,000	22,464,000,000	26,956,800,000	32,348,160,000
		DINAS	5,300,000,000	6,360,000,000	7,632,000,000	9,158,400,000	10,990,080,000	13,188,096,000
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	1,100,000,000	1,320,000,000	1,584,000,000	1,900,800,000	2,280,960,000	2,737,152,000
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,905,000,000	4,686,000,000	5,623,200,000	6,747,840,000	8,097,408,000	9,716,889,600
		DINAS	1,525,000,000	1,830,000,000	2,196,000,000	2,635,200,000	3,162,240,000	3,794,688,000
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	340,000,000	408,000,000	489,600,000	587,520,000	705,024,000	846,028,800

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,045,000,000	14,454,000,000	17,344,800,000	20,813,760,000	24,976,512,000	29,971,814,400
		DINAS	5,500,000,000	6,600,000,000	7,920,000,000	9,504,000,000	11,404,800,000	13,685,760,000
		UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	935,000,000	1,122,000,000	1,346,400,000	1,615,680,000	1,938,816,000	2,326,579,200
TOTAL			1,140,278,442,077	1,368,334,130,492	1,642,000,956,591	1,970,401,147,909	2,364,481,377,491	2,837,377,652,989

2. DINAS

a. Sekretariat :

1. Sub Bagian Program;

TABEL

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM								
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4,950,000,000	5,940,000,000	7,128,000,000	8,553,600,000	10,264,320,000	12,317,184,000
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			4,950,000,000	5,940,000,000	7,128,000,000	8,553,600,000	10,264,320,000	12,317,184,000
		1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	3,500,000,000	4,200,000,000	5,040,000,000	6,048,000,000	7,257,600,000	8,709,120,000
		1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3,500,000,000	4,200,000,000	5,040,000,000	6,048,000,000	7,257,600,000	8,709,120,000
		1.01.06.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		1.01.06.1.01.02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		1.01.06.1.01.03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		1.01.06.1.01.04 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		1.01.06.1.01.05 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000

		1.01.06.1.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		1.01.06.1.01.07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
	X		10,397,500,000	12,477,000,000	14,972,400,000	17,966,880,000	21,560,256,000	25,872,307,200
	X.XX		10,397,500,000	12,477,000,000	14,972,400,000	17,966,880,000	21,560,256,000	25,872,307,200
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,397,500,000	12,477,000,000	14,972,400,000	17,966,880,000	21,560,256,000	25,872,307,200
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,397,500,000	12,477,000,000	14,972,400,000	17,966,880,000	21,560,256,000	25,872,307,200
		X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	747,500,000	897,000,000	1,076,400,000	1,291,680,000	1,550,016,000	1,860,019,200
		X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000	746,496,000
		X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000	746,496,000
		X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000	746,496,000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
		X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000	746,496,000
		X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,050,000,000	9,660,000,000	11,592,000,000	13,910,400,000	16,692,480,000	20,030,976,000
		X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400,000,000	480,000,000	576,000,000	691,200,000	829,440,000	995,328,000
TOTAL			15,347,500,000	18,417,000,000	22,100,400,000	26,520,480,000	31,824,576,000	38,189,491,200

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset:

TABEL.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET								
	X		601,331,252,077	721,597,502,492	865,917,002,991	1,039,100,403,589	1,246,920,484,307	1,496,304,581,168
	X.XX		601,331,252,077	721,597,502,492	865,917,002,991	1,039,100,403,589	1,246,920,484,307	1,496,304,581,168
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	601,331,252,077	721,597,502,492	865,917,002,991	1,039,100,403,589	1,246,920,484,307	1,496,304,581,168
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	599,231,252,077	719,077,502,492	862,893,002,991	1,035,471,603,589	1,242,565,924,307	1,491,079,109,168
		X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	598,031,252,077	717,637,502,492	861,165,002,991	1,033,398,003,589	1,240,077,604,307	1,488,093,125,168
		X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-
		X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,400,000,000	1,680,000,000	2,016,000,000	2,419,200,000	2,903,040,000	3,483,648,000
		X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
		XXX.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		XXX.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		XXX.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		XXX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		XXX.01.1.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		XXX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	700,000,000	840,000,000	1,008,000,000	1,209,600,000	1,451,520,000	1,741,824,000
		XXX.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		XXX.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		XXX.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		XXX.01.1.04.04 Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		XXX.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		XXX.01.1.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		XXX.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
TOTAL			601,331,252,077	721,597,502,492	865,917,002,991	1,039,100,403,589	1,246,920,484,307	1,496,304,581,168

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

TABEL

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM								
X			17,375,000,000	20,850,000,000	25,020,000,000	30,024,000,000	36,028,800,000	43,234,560,000
X.XX			17,375,000,000	20,850,000,000	25,020,000,000	30,024,000,000	36,028,800,000	43,234,560,000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17,375,000,000	20,850,000,000	25,020,000,000	30,024,000,000	36,028,800,000	43,234,560,000
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,400,000,000	2,880,000,000	3,456,000,000	4,147,200,000	4,976,640,000	5,971,968,000
		XXX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		XXX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
		XXX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
		XXX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
		XXX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
		XXX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		XXX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1			2	3	4	5	6	7
		X.XX.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000
		X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,650,000,000	3,180,000,000	3,816,000,000	4,579,200,000	5,495,040,000	6,594,048,000
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
		X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	180,000,000	216,000,000	259,200,000	311,040,000	373,248,000
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000	180,000,000	216,000,000	259,200,000	311,040,000	373,248,000
		X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150,000,000	180,000,000	216,000,000	259,200,000	311,040,000	373,248,000
		X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	150,000,000	180,000,000	216,000,000	259,200,000	311,040,000	373,248,000
		X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	150,000,000	180,000,000	216,000,000	259,200,000	311,040,000	373,248,000
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000
		X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,300,000,000	6,360,000,000	7,632,000,000	9,158,400,000	10,990,080,000	13,188,096,000
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	-	-	-	-	-	-
		X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800,000,000	960,000,000	1,152,000,000	1,382,400,000	1,658,880,000	1,990,656,000
		X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,525,000,000	1,830,000,000	2,196,000,000	2,635,200,000	3,162,240,000	3,794,688,000
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,000,000	30,000,000	36,000,000	43,200,000	51,840,000	62,208,000
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,500,000,000	6,600,000,000	7,920,000,000	9,504,000,000	11,404,800,000	13,685,760,000
		X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
		X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
			PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					

b. Bidang Kebudayaan :

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1		2	3	4	5	6	7
BIDANG KEBUDAYAAN							
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6,150,000,000	7,380,000,000	8,856,000,000	10,627,200,000	12,752,640,000	15,303,168,000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		6,150,000,000	7,380,000,000	8,856,000,000	10,627,200,000	12,752,640,000	15,303,168,000
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2,400,000,000	2,880,000,000	3,456,000,000	4,147,200,000	4,976,640,000	5,971,968,000
	2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	1,555,200,000	1,866,240,000	2,239,488,000
	2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000	746,496,000
	2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
	2.22.02.1.01.03 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	350,000,000	420,000,000	504,000,000	604,800,000	725,760,000	870,912,000
	2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	750,000,000	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	1,555,200,000	1,866,240,000
	2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
	2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
	2.22.02.1.02.03 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
	2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750,000,000	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	1,555,200,000	1,866,240,000
	2.22.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000
	2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	622,080,000

BAB IV
PENUTUP

Demikian rencana kerja (Renja-OPD) Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dirancang sebagai upaya untuk menawarkan program.

Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara detail diuraikan dalam Visi dan Misi organisasi Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tujuan dan strategi yang akan dicapai serta implementasi pelaksanaan program dan berbagai tindak kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Satuan Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dimaksud.

Selanjutnya penyusunan Renja-OPD pada dasarnya sangat bermakna bagi Rencana Tindakan pelaksanaan tugas dan fungsi secara sistematis, transparan dan Akuntabel, terstruktur sehingga dapat mengevaluasi dan mengoreksi beban tugas dan fungsi yang belum maksimal. Disamping itu patokan kinerja yang diharapkan dengan mudah dapat diklasifikasikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan untuk masa akan datang.

Demikian dokumen ini dibuat, Insya Allah kami dapat melakukan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan.

Palu, Maret 2023
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

ANITA NAMA L JEMBAH, SH., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670327 198903 1009